



Kecamatan Pondokmelati



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN PONDOKMELATI**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025**

*Jl. Pasar Kecapi, Perum Chandra Indah RT. 11 RW. 016
Tlp. 021-8489744, Kelurahan Jatirahayu - Kecamatan Pondokmelati
Kota Bekasi*



kec.pomel@yahoo.com



www.kec.pondokmelati.bekasikota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKIP ini merupakan wujud memberikan kewajiban pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan-undangan mengenai Sistem Akun

LKIP ini berisi informasi mengenai capaian sasaran, indikator kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Dokumen ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan rencana, pemanfaatan sumber daya, serta tingkat keberhasilan kinerja Kecamatan Pondokmelati dalam penyelenggaraan pemerintahan da

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kecamatan dan Kelurahan, serta para pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Harapannya, LKIP Tahun 2025 ini dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja Kecamatan Pondokmelati.

Demikian kata pengantar ini disampaikan. Semoga laporan ini memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan Pondokmelati.

Bekasi, Januari 2025
Camat Pondokmelati,

Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat 1,IV/b
NIP. 197609131997011001



LKIP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab 1	Pendahuluan.....	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Tugas, Fungsi dan Struktur Orgnasiasi Kecamatan Pondokmelati Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019.....	4
1.3	Aspek Strategis Organisasi	9
1.3.1	Isu Strategis Kecamatan Pondokmelati	11
Bab 2	Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja	13
A.	Tujuan Dan Sasaran Kecamatan	13
B.	Perjanjian Kinerja	14
	B.1 Strategi, Program dan Kegiatan Kecamatan Pondokmelati	14
Bab 3	Akuntabilitas Kinerja	18
A.	Capaian Kinerja Organisasi	18
I.	Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	18
Bab 4	Penutup	32
A.	Kesimpulan	32
B.	Rencana Tindak	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi	6
Tabel 1.2	Kondisi Existing Pegawai Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Berdasarkan Esselonering/Fungsionnal	8
Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2025-2029	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2025	8
Tabel 2.3	Strategi, Program dan Kegiatan Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2025	14
Tabel 2.4	Rekapitulasi Progran dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi	16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3.2	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025	19
Tabel 3.3	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025	11 19
Tabel 3.4	Perbandingan Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan public Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir	20
Tabel 3.5	Perbandingan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir	20
Tabel 3.6	Perbandingan Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	21
Tabel 3.7	Perbandingan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025 dengan dengan Target Jangka Menengah	22
Tabel 3.8	Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/ Kegagalan Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati	23
Tabel 3.9	Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/ Kegagalan Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati	23
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
Tabel 3.11	Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	27



Bab I

Perencanaann Dan Perjanjian Kinerja



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025 menjadi suatu keharusan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik yang esensial. LKIP ini disusun sebagai wujud komitmen Camat dan seluruh perangkat kecamatan untuk melaksanakan amanah konstitusi, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa di wilayah Kecamatan Pondokmelati.

Penyusunan LKIP Tahun 2025 berlandaskan pada kerangka regulasi dan literasi tata kelola terkini. Landasan hukum utama adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), yang menekankan prinsip akuntabilitas kinerja, partisipasi publik, dan pemerintahan digital. Secara nasional, arah pembangunan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tema "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan". Pada tingkat teknis, pedoman penyusunan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah, yang mengintegrasikan sistem



LKIP

perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis elektronik (e-kinerja).

Secara kontekstual, Tahun 2025 merupakan tahun kritis dalam percepatan pencapaian target pembangunan jangka menengah Kecamatan Pondokmelati. Berdasarkan analisis lingkungan strategis, beberapa isu prioritas yang melatarbelakangi fokus kinerja tahun ini adalah:

1. Akselerasi Transformasi Digital dan Smart Governance: Merespon Instruksi Presiden mengenai GovTech dan Peraturan Menteri PANRB tentang Standar Layanan Digital, Kecamatan Pondokmelati berkomitmen untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat melalui integrasi pelayanan berbasis platform digital.
2. Penguatan Ketahanan Ekonomi Lokal dan Wirausaha: Menjawab tantangan pascapandemi dan dinamika global dengan fokus pada pemberdayaan UMKM, ekonomi sirkular, dan penguatan pasar tradisional, sejalan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya untuk kemudahan berusaha.
3. Pembangunan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim: Mewujudkan komitmen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup, dengan program konkret seperti penanganan sampah terpadu, peningkatan ruang terbuka hijau, dan adaptasi terhadap risiko bencana hidrometeorologi.
4. Peningkatan Kualitas SDM dan Inklusi Sosial: Memperkuat literasi kesehatan, pendidikan karakter, serta perlindungan bagi kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas, lansia) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak



LKIP

Pidana Kekerasan Seksual dan berbagai regulasi tentang inklusivitas.

5. Penguatan Sinergi Pentahelix dan Kolaborasi Antarwilayah: Mengoptimalkan peran serta akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media dalam menyelesaikan masalah perkotaan, serta memperkuat integrasi dengan kecamatan sekitar dalam tata ruang dan pelayanan publik.

Di sisi internal, Kecamatan Pondokmelati telah membangun fondasi melalui modernisasi sistem administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan inovasi pelayanan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, kesenjangan infrastruktur digital antarkelurahan, dan tekanan pertumbuhan penduduk memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan terukur. Dengan demikian, LKIP Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025 berfungsi sebagai:

1. Instrumen Akuntabilitas, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik kepada seluruh stakeholder.
2. Alat Evaluasi Manajemen, untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran strategis dalam Renstra dan Renja Kecamatan.
3. Dasar Pengambilan Keputusan, menyediakan data dan analisis untuk perbaikan kebijakan, perencanaan, dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran tahun berikutnya.
4. Media Komunikasi Kinerja, yang transparan dan mudah diakses oleh publik untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Melalui semangat literasi data dan kinerja yang responsif terhadap regulasi terbaru, LKIP ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pelaporan, tetapi juga peta jalan (roadmap) untuk terus mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga kontribusi Kecamatan



Pondokmelati terhadap terwujudnya kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan dapat optimal dan terukur.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Orgnasiasi Kecamatan Pondokmelati

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dibawah ini diuraikan Tugas-tugas dan fungsi Kecamatan Pondokmelati :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
7. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;



LKIP

11. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
12. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut adalah susunan organisasi Kecamatan Pondokmelati:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi, terdiri atas :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Kelurahan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pondokmelati didukung oleh Pegawai terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan P3K. Adapun komposisi Pegawai ditunjukkan dalam table berikut :



LKIP

**Tabel 1.1
Data Pegawai Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi**

No	Nama	Pangkat Terakhir		Jabatan		Pendidikan Formal	Unit Kerja	Jenis Kelamin
		Pangkat	Gol	Nama	Eselon			
1	Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M	Pembina Tk.I	IV/b	Camat Pondokmelati	III.a	S2	Kecamatan Pondokmelati	Pria
2	Sudarsono S.E, M.A.	Pembina	IV/a	Sekretaris Kecamatan Pondokmelati	III.b	S2	Kecamatan Pondokmelati	Pria
3	Udin Samsudin, S.Kep., M.M.	Pembina	IV/a	Kepala Seksi Permasbang Kelurahan Jatimelati	IV.b	S2	Kelurahan Jatimelati	Pria
4	Kosasih S.E	Penata Tk.I	III/d	Lurah Jatimelati	IV.a	S1	Kelurahan Jatimelati	Pria
5	Mochamad Sunaryadi S.E.	Penata Tk.I	III/d	Lurah Jatimurni	IV.a	S1	Kelurahan Jatimurni	Pria
6	Toto Irawan, S.E	Penata Tk.I	III/d	Kepala Seksi Permas Kecamatan Pondokmelati	IV.a	S1	Kecamatan Pondokmelati	Pria
7	Muhammad Sukri S.Pd.I	Penata Tk.I	III/d	Kepala Seksi Kesos Kelurahan Jatimurni	IV.b	S1	Kelurahan Jatimurni	Pria
8	Nahwan Wawan S.E.	Penata Tk.I	III/d	Kepala Seksi Kesos Kecamatan Pondokmelati	IV.a	S1	Kecamatan Pondokmelati	Pria
9	Irwan Sumirat, S.Sos	Penata Tk.I	III/d	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pondokmelati	IV.a	S1	Kecamatan Pondokmelati	Pria
10				Sekretaris Kelurahan Jatimelati	IV.b		Kelurahan Jatimelati	
11	Mohamad Jawawi, SE	Penata Tk.I	III/d	Kepala Seksi Ekbang Kecamatan Pondokmelati	IV.a	S1	Kecamatan Pondokmelati	Pria
12	Suhaeli, S.E	Penata Tk.I	III/d	Kepala Seksi Permasbang Kelurahan Jatiwarna	IV.b	S1	Kelurahan Jatiwarna	Pria
13	Ahmad Budiman, S.Pd	Penata Tk I	III/d	Kepala Seksi Kesos Kelurahan Jatirahayu	IV.b	S1	Kelurahan Jatirahayu	Pria
14	Ferry Prihadi Kurniawan, S.E.	Penata Tk I	III/d	Lurah Jatirahayu	IV.a	S1	Kelurahan Jatirahayu	Pria
15	Karya Sukma Wijaya, S.Pd., M.A.	Penata Tk I	III/d	Sekretaris Kelurahan Jatirahayu	IV.b	S2	Kelurahan Jatirahayu	Pria
16				Kepala Seksi Pentibum Kelurahan Jatimelati			Kelurahan Jatimelati	
17	Jaenudin, S.AG	Penata Tk I	III/d	Kepala Seksi Kesos Kelurahan Jatimelati	IV.b	S1	Kelurahan Jatimelati	Pria
18	M. Subur Saleh, S.AP	Penata Tk.I	III/d	Lurah Jatiwarna	IV.a	S1	Kelurahan Jatiwarna	Pria



No	Nama	Pangkat Terakhir		Jabatan		Pendidikan Formal	Unit Kerja	Jenis Kelamin
		Pangkat	Gol	Nama	Eselon			
19	Abd. Goni, S.Sos	Penata Tk.I	III/d	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelaurahan Jatiwarna	IV.b	S1	Kelurahan Jatiwarna	Pria
20	Aan Burhanudin, S.E	Penata Tk.I	III/d	Kepala Seksi Permasbang Kelurahan Jatimurni	IV.b	S1	Kelurahan Jatimurni	Pria
21	Karyadi, S.E	Penata Tk.I	III/d	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pondokmelati	IV.a	S1	Kecamatan Pondokmelati	Pria
22	Nanang Supriatna SE.	Penata Tk.I	III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan	IV.b	S1	Kecamatan Pondokmelati	Pria
23	Sigit Wahyu Djatmika, S.Pd	Penata Tk.I	III/d	Kepala Seksi Permasbang Kelurahan Jatiwarna	IV.b	S1	Kelurahan Jatiwarna	Pria
24				Sekretaris Kelurahan Jatiwarna	IV.b		Kelurahan Jatiwarna	
25	Ahmad Yani, S.E	Penata Tk.I	III/d	Kepala Seksi Pentibum Kelurahan Jatirahayu	IV.b	S1	Kelurahan Jatirahayu	Pria
26	Olga Sanusi A.Md.	Penata	III/c	Kepala Seksi Permasbang Kelurahan Jatirahayu	IV.b	D3	Kelurahan Jatirahayu	Pria
27	Yasim, A.Md	Penata	III/c	Kepal Sub Bagian Tata Usaha	IV.b	D-III	Kecamatan Pondokmelati	Pria
28	Rini Ernawati S.Stp., Ma.P	Penata	III/c	Sekretaris Kelurahan Jatimurni	IV.b	S2	Kelurahan Jatimurni	Wanita
29	Abdul Rahman, S.Ap	Penata	III/c	Kepala Seksi Permasbang Jatimurni	IV.b	S1	Kelurahan Jatimurni	Pria
30	Mustardi, S.Ip	Penata Muda Tk.I	III/b	Penata Layanan Operasional pada Sub Bagian Keuangan	-	S1	Kecamatan Pondokmelati	Pria
31	Sunaryo S.Sos.	Penata Muda Tk.I	III/b	Penata Layanan Operasional pada Sekretariat Kelurahan Jatiwarna	-	S1	Kelurahan Jatiwarna	Pria
32	Gugun Febriyanto, Se	Penata Muda Tk.I	III/b	Penata Layanan Operasional pada Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Jatimelati	-	S1	Kelurahan Jatimelati	Pria
33	Nasri, S.Ap	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan Jatirahayu	-	S1	Kelurahan Jatirahayu	Pria
34	Sri Haryeni, S.Ap	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional pada Sub Bagian Tata Usaha	-	S1	Kecamatan Pondokmelati	Wanita
35	Nur Hayati, A.Md	Penata Muda	III/a	Pengelola Layanan Operasional pada Sekretariat Kelurahan Jatimelati	-	D-III	Kelurahan Jatimelati	Wanita



No	Nama	Pangkat Terakhir		Jabatan		Pendidikan Formal	Unit Kerja	Jenis Kelamin
		Pangkat	Gol	Nama	Eselon			
36	Dede Hartati, A.Md.Par	Penata Muda	III/a	Pengelola Layanan Operasional pada Sekretariat Kelurahan Jatimelati	-	D-III	Kelurahan Jatimelati	Wanita
37	Supriady	Pengatur Tk.I	II/d	Pengadministrasi Perkantoran Pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	SMA	Kecamatan Pondokmelati	Pria
38	Timin Tusin	Pengatur Tk.I	II/d	Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Jatimurni	-	SMA	Kelurahan Jatimurni	Pria
39	Muhamad Yatna	Pengatur Tingkat I	II/d	Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pemerintahan	-	SMA	Kecamatan Pondokmelati	Pria
40	Minarni	Pengatur Tingkat I	II/d	Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Kelurahan Jatiwarna	-	SMA	Kelurahan Jatiwarna	Wanita
41	Usman	Pengatur Tingkat I	II/d	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Tata Usaha	-	SMA	Kecamatan Pondokmelati	Pria
42	Tata Mintardja	Pengatur	II/c	Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Kelurahan Jatimurni	-	SMP	Kelurahan Jatimurni	Pria
43	Udih Komarudin Saleh	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Tata Usaha	-	SMP	Kecamatan Pondokmelati	Pria
44	Ranih	Pengatur Muda	II/a	Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Kelurahan Jatimurni	-	SMP	Kelurahan Jatimurni	Wanita

Sumber:Kepegawaian Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025, diolah

Tabel 1. 2
Kondisi Existing Pegawai Kecamatan Pondokmelati Kota Depok
Berdasarkan Esselonering/Fungsional

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Esselon II	-	-	-
2	Esselon III	2		2
3	Esselon IV	23	1	24
4	Jabatan Fungsional	10	5	15
5	Jabatan P3K	55	39	94
	TOTAL	90	45	135

Sumber:Kepegawaian Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025, diolah



LKIP

Berdasarkan data per 31 Desember 2025, jumlah aparatur Kecamatan Pondok Melati sebanyak 135 orang. Secara gender, komposisi aparatur masih didominasi oleh pegawai laki-laki dengan jumlah 90 orang (66,7%), sementara perempuan berjumlah 45 orang (33,3%). Komposisi berdasarkan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

1. Jabatan Struktural (Eselon): Sebanyak 26 orang memegang jabatan struktural. Pengisian jabatan eselon III dan IV menunjukkan dominasi laki-laki yang signifikan, dengan 2 orang di eselon III (100%) dan 23 orang di eselon IV (95,8%). Hanya terdapat 1 orang perempuan (4,2%) yang menduduki jabatan eselon IV, sementara untuk eselon II masih dalam proses pengisian.
2. Jabatan Fungsional: Terdapat 15 orang yang menduduki jabatan fungsional dengan komposisi gender yang lebih seimbang, yaitu 10 orang laki-laki (66,7%) dan 5 orang perempuan (33,3%).
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K): Kelompok ini merupakan mayoritas sumber daya manusia di kecamatan dengan 94 orang (69,6% dari total aparatur). Komposisinya adalah 55 orang laki-laki (58,5%) dan 39 orang perempuan (41,5%).

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Kecamatan Pondokmelati merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak dipusat Pemerintahan kota Bekasi, yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya. Letak Kecamatan Pondokmelati sangat strategis, dilihat dari aspek geografis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Pondokgede.

Sebelah Selatan : Kecamatan Jatisampurna.

Sebelah Timur : Kecamatan Jati Asih.

Sebelah Barat : Kecamatan DKI Jakarta.



LKIP

Keadaan topografi Kecamatan Pondokmelati merupakan daerah dataran rendah, sehingga menyebabkan pada beberapa daerah sulit untuk membuang air limpasan hujan dengan cepat.

Luas wilayah Kecamatan Pondokmelati adalah 1.179.925 Ha yang terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu :

- Kelurahan Jatirahayu : 312,425 Ha
- Kelurahan Jatiwarna : 248,000 Ha
- Kelurahan Jatimelati : 316,000 Ha
- Kelurahan Jatimurni : 300,500 Ha

Kecamatan Pondokmelati terdiri dari 57 RW dan 390 RT, dengan banyaknya wilayah perumahan berpengaruh pada kemajemukan masyarakatnya. Hal ini akan memacu pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan / penyediaan pelayanan sarana dan prasarana yang lebih baik dalam pemanfaatan tanah fasos/fasum yang disediakan oleh para pengembang perumahan di Kecamatan Pondokmelati yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Bekasi. Kecamatan Pondokmelati sebagai bagian dari pemerintahan daerah memiliki berbagai kegiatan dan layanan yang meliputi aspek administratif, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah beberapa kegiatan dan layanan yang biasanya tersedia:

1. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

- Perbaikan jalan lingkungan dan drainase;
- Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas umum (taman, posyandu, tempat ibadah) Program penghijauan dan kebersihan lingkungan

2. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- Pembinaan UMKM;
- Pelatihan kerja dan wirausaha;
- Program PKK dan Posyandu.



LKIP

3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

- Koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga ketertiban;
- Penanganan konflik sosial dan mediasi warga;
- Pembinaan Linmas dan FKPM.

Kecamatan Pondokmelati Juga mempunyai inovasi Pelopor Pomel (Pelayanan Optiman, Profesional, Responsif Podokmelati), Pomel Beraksi (Pondokmelati Berbagi Amanah Kegiatan Sosial). Upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

1.3.1 Isu Strategis Kecamatan Pondokmelati

Dengan memperhatikan situasi lingkungan strategi nasional, daerah, serta internal terdapat 3 (tiga) isu strategis pada penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pondokmelati :

1. Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan (LKM) dalam mendukung pelayanan publik. LKM memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik di bidang kesehatan, penanganan kemiskinan, dan pengembangan UMKM melalui program sosialisasi, pendataan, serta pendampingan masyarakat. Namun, belum seluruh LKM



LKIP

- berfungsi secara aktif dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan, sehingga isu strategis diarahkan pada peningkatan LKM yang mendukung pelayanan publik sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat.
2. Belum optimalnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati. Pelayanan publik yang belum sepenuhnya responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat, termasuk dalam akses layanan kesehatan, fasilitasi program penanggulangan kemiskinan, serta dukungan terhadap pengembangan UMKM. Isu ini menjadi dasar penetapan sasaran peningkatan efektivitas pelayanan masyarakat yang diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat.
 3. Perlunya memperkuat sinergi pelayanan dalam mendukung kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan UMKM. Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan, kemiskinan, dan UMKM masih memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan peran kelembagaan masyarakat. Keterbatasan sinergi berdampak pada belum optimalnya capaian pelayanan publik secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara kecamatan, kelurahan, dan LKM menjadi isu strategis untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan peran LKM dan efektivitas pelayanan masyarakat.



Bab II

Perencanaann Dan Perjanjian Kinerja

**BAB 2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

A. Tujuan dan Sasaran Kecamatan

Secara umum, peran Kecamatan Pondokmelati sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kota Bekasi adalah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Secara spesifik, peran Kecamatan Pondokmelati terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tujuan : 1. Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokmelati.

Sedangkan Kecamatan Pondokmelati mendukung 2 sasaran strategis pembangunan daerah Kota Bekasi, disajikan pada table dibawah ini:

**Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pondokmelati
Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokmelati		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	85	85,20	85,40	85,70	86,00
		1.1. Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persen	65%	67%	69%	71%	73%
		1.2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati	Nilai	0,07	0,24	0,24	0,35	0,35

Sumber Renstra Kecamatan Pondokmelati 2025-2029

B. PERJANJIAN KINERJA

Dengan telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Pondokmelati Kota Bekasi untuk Tahun 2025, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Utama dimaksud sebagai berikut:

**Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pondokmelati
Kota Bekasi Tahun 2025**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1		2	3	4
1	Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persen	65%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati	Nilai	0,07

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025

B.1 Strategi, Program dan Kegiatan Kecamatan Pondokmelati

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka diperlukan rencana program dan kegiatan. Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3
Strategi, Program dan Kegiatan Kecamatan Pondokmelati
Kota Bekasi Tahun 2025**

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2	3
I	Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		Evaluasi Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2	3
II	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</p> <p>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</p> <p>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang terkait dalam Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</p>

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2	3
		<p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan</p> <p>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan</p> <p>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p> <p>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan</p> <p>Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p>

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar Rp. 32.519.540.866,00, jika dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi

No	Nama Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Kecamatan Pondokmelati		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.726.639.466,00	Sekretariat
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	127.309.000,00	Seksi Pamarintahan / Seksi Ekonomi dan Pembangunan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	409.207.000,00	Seksi Permas/Seksi Pamarintahan / Seksi Ekonomi dan Pembangunan
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	496.972.000,00	Seksi Trantib/ Seksi Kesos
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000,00	Seksi Trantib
	Jumlah	18.795.127.466,00	

No	Nama Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
Kelurahan Jatirahayu			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50.000.000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.212.586.000,00	
	Jumlah	5.262.586.000	
Kelurahan Jatiwarna			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000,00	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.646.744.800,00	
	Jumlah	2.666.744.800,00	
Kelurahan Jatimelati			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000,00	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.321.366.800,00	
	Jumlah	3.341.366.800,00	
Kelurahan Jatimurni			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000,00	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.433.715.800,00	
	Jumlah	2.453.715.800,00	
	Total	32.519.540.866,00	

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025



Bab III **Akuntabilitas** **Kinerja**

**BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui target sasaran Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Kriteria pencapaian indikator kinerja menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
	76% ≤ 90%	Tinggi
	66% ≤ 75%	Sedang
	51% ≤ 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun pengukuran kinerja kegiatan Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dijabarkan di bawah ini:

I. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama**1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah
Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025**



a. Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik

Tabel 3.2
Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik
Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025

Uraian	2024	2025
Target	-	65%
Realisasi	-	65%
Capaian Kinerja	-	100%

Pada tahun 2025, indikator **Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik** mulai diterapkan sebagai bagian dari penyesuaian indikator kinerja Kecamatan Pondokmelati. Target yang ditetapkan sebesar 65% telah tercapai dengan realisasi sebesar 65%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar Lembaga Kemasyarakatan telah berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan, khususnya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan program fasilitasi pelayanan, serta mencerminkan efektivitas upaya penguatan peran LKM yang dilakukan oleh Kecamatan Pondokmelati.

b. Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati

Tabel 3.3
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
Pondokmelati Tahun 2025

Uraian	2024	2025
Target	-	0,07
Realisasi	-	0,34
Capaian Kinerja	-	485%

Indikator **Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati** mulai diterapkan pada tahun 2025 sebagai indikator kinerja baru dengan target peningkatan sebesar **0,07%** . Realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar **0,34%**, sehingga realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan. Tingginya capaian kinerja dipengaruhi oleh rendahnya target pada tahun awal indikator penerapan serta adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang signifikan. Capaian ini sejalan dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pondokmelati dari 84,94 pada tahun 2024 menjadi 87,86 pada tahun 2025, yang menunjukkan peningkatan kinerja



LKIP

pelayanan publik secara nyata. Penetapan target yang relatif kecil disebabkan oleh keterbatasan baseline pada tahun awal implementasi indikator kinerja.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

1. Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik

Tabel 3.4
Perbandingan Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Uraian	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	65%
Realisasi	-	-	-	65%
Capaian Kinerja	-	-	-	100%

Indikator **Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik** baru diterapkan pada tahun 2025, sehingga pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 65% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 65%, sehingga tercapaian kinerja mencapai 100%. Dengan demikian, perbandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dilakukan secara kuantitatif. Namun pencapaian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Pondokmelati telah berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan menjadi dasar penguatan peran LKM pada periode perencanaan berikutnya.

2. Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati

Tabel 3.5
Perbandingan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Uraian	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	0,07
Realisasi	-	-	-	0,34
Capaian Kinerja	-	-	-	485%



LKIP

Indikator **Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati** baru diterapkan pada tahun 2025, sehingga pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 belum ditetapkan target dan belum dilakukan pengukuran kinerja. Pada tahun 2025, target peningkatan ditetapkan sebesar 0,07, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,34, sehingga capaian kinerja mencapai 485%. Tingginya capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh rendahnya target pada tahun awal penerapan indikator, sehingga setiap peningkatan memberikan dampak signifikan terhadap persentase capaian. Capaian ini sejalan dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pondokmelati dari 84,94 pada tahun 2024 menjadi 87,86 pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik secara nyata. Hasil pencapaian ini menjadi dasar evaluasi dan penetapan target kinerja yang lebih proporsional pada periode perencanaan selanjutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA

1. Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik

Tabel 3.6
Perbandingan Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Target	65%	67%	69%	71%	73%	75%
Realisasi	65%	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur
Capaian Kinerja	100%	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur
Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (%)	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur

Capaian kinerja Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Pondokmelati tahun 2025 terhadap target akhir



LKIP

RENSTRA belum bisa diukur, karena tahun 2025 merupakan tahun awal Renstra periode 2025-2029.

2. Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati

Tabel 3.7
Perbandingan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025 dengan dengan Target Jangka Menengah

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Target	0,07	0,24	0,24	0,35	0,35	0,40
Realisasi	0,34	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur
Capaian Kinerja	485%	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur
Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (%)	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur	Belum bisa diukur

Capaian kinerja Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati tahun 2025 terhadap target akhir RENSTRA belum bisa diukur, karena tahun 2025 merupakan tahun awal Renstra periode 2025-2029

4. Hasil analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- a. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati dengan indikator sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Pondokmelati tahun 2025 serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebanyak 2 kegiatan yang mendukung untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel di Lingkup Kecamatan Pondokmelati, terdapat 2 kegiatan tercapai, Disajikan table berikut :



LKIP **Tabel 3.8**
Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/ Kegagalan
Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di
Kecamatan Pondokmelati

No	Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	100	100
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	100	100

Pencapaian indikator sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Pondokmelati pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal, dengan target sebesar 65% dan realisasi sebesar 65% atau pencapaian kinerja 100%. Keberhasilan tersebut didukung oleh terlaksananya kegiatan-kegiatan yang secara langsung diperkuat dengan penguatan peran LKM, yaitu Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, yang masing-masing mencapai realisasi 100% dari target yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tersebut mendorong peningkatan partisipasi dan peran aktif LKM dalam mendukung pelayanan publik, baik dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, fasilitasi program pemerintah, maupun koordinasi di tingkat kelurahan dan kecamatan. Tidak terdapat faktor kegagalan yang signifikan dalam pencapaian indikator ini, namun masih diperlukan penguatan kualitas dan keinginan peran LKM agar kontribusinya terhadap pelayanan publik semakin optimal.

Sebagai alternatif solusi dan upaya peningkatan kinerja ke depan, Kecamatan Pondokmelati perlu mendorong peningkatan kapasitas LKM melalui pembinaan berkelanjutan, memperkuat koordinasi antara LKM dengan kelurahan dan perangkat daerah terkait, serta mengarahkan peran LKM agar lebih terintegrasi dengan kebutuhan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, penanganan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, evaluasi berkala terhadap keaktifan dan kontribusi LKM perlu dilakukan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan penetapan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya.



LKIP

- b. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati tahun 2025 serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebanyak 2 kegiatan yang mendukung untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel di Lingkup Kecamatan Pondokmelati, terdapat 2 kegiatan tercapai, Disajikan table berikut :

Tabel 3.9
Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/ Kegagalan
Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan
Pondokmelati

No	Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	100	100%
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100%
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100%
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100%
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100%
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100%
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%

Pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati didukung oleh terlaksananya seluruh kegiatan utama dengan capaian kinerja 100%, sebagaimana tercermin pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, serta Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang memberikan kontribusi langsung kelancaran terhadap dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah memperkuat peran kecamatan dalam pelayanan administratif dan koordinatif kepada masyarakat.



LKIP

Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh kegiatan pemeliharaan tata kelola pemerintahan yang berjalan optimal, meliputi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang seluruhnya mencapai realisasi 100% dari target. Tidak terdapat kegiatan yang mengalami kegagalan dalam mendukung pencapaian sasaran. Namun demikian, ke depan diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan integrasi antarprogram agar efektivitas pelayanan masyarakat tidak hanya tercapai dari sisi penyelesaian kegiatan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kepuasan masyarakat.

5. Hasil analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya tidak berdampak buruk terhadap capaian kinerja Kecamatan, namun berdampak terhadap tingginya beban kerja individu. Efisiensi sumber daya terjadi pada Kecamatan Pondokmelati berupa optimalisasi beban kerja kepada seluruh pegawai Kecamatan, karena terbatasnya jumlah SDM.

Adapun efisiensi anggaran dari sasaran strategis Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Nilai Efisiensi	
				Jumlah	%
1	Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati	14.023.620.400,00	13.440.845.750	582.774.650	4,16%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati	18.495.920.466,00	16.312.810.369,	2.183.110.097	11,80%
	Jumlah	32.519.540.866,00	29.753.656.119,00	2.765.884.747,00	8,51%

Sumber : Dokumen Perencanaan, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran terhadap sasaran strategis Kecamatan Pondokmelati, dapat disimpulkan bahwa



LKIP

pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan secara efisien dan terkendali.

Pada sasaran “Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati” , dari total anggaran sebesar Rp14.023.620.400,00 terealisasi sebesar Rp13.440.845.750,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp582.774.650,00 atau 4,16% . Efisiensi ini menunjukkan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif tanpa mengurangi capaian output dan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, pada target “Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati” , dari anggaran sebesar Rp18.495.920.466,00 terealisasi sebesar Rp16.312.810.369,00, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp2.183.110.097,00 atau 11,80% . Efisiensi tersebut mencerminkan adanya pengendalian anggaran yang baik serta optimalisasi belanja dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat.

Secara keseluruhan, total anggaran Kecamatan Pondokmelati sebesar Rp32.519.540.866,00 dengan realisasi sebesar Rp29.753.656.119,00 menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp2.765.884.747,00 atau 8,51% . Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan mendukung pencapaian sasaran strategi yang telah ditetapkan.

6. Hasil analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Subbab ini menyajikan analisis hasil terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pondokmelati dalam mendukung pencapaian pernyataan kinerja. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara pelaksanaan program/kegiatan dengan capaian indikator kinerja, baik yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program/kegiatan serta menjadi dasar pembahasan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Dibawah ini disajikan Tabel program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Tabel 3.11
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Tahun 2025		
			Target	Realisasi Keuangan	Capaian (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	17.726.639.466	15.611.636.807	88,08
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	1.000.000	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	13.520.241.000	11.727.194.655	86,74
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan Administrasi Pepegawaian Perangkat Daerah	25.400.000	20.000.000	78,74
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.487.650	293.706.202	78,43
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya ketersediaan Jasa Penunjang Urusan	3.368.610.816	3.183.080.322	94,49
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	436.900.000	387.655.628	88,73



LKIP

**KECAMATAN PONDOKMELATI
KOTA BEKASI**

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Tahun 2025		
			Target	Realisasi Keuangan	Capaian (%)
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	232.309.000	198.497.350	85,45
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14.800.000	1.400.000	9,46
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	217.509.000	197.097.350	90,62
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase LKM yang aktif	14.023.620.400	13.440.845.750	95,84
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terselenggarannya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13.736.613.400	13.168.909.760	95,87
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggarannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	287.007.000	271.935.990	94,75
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	496.972.000	470.897.712	94,75



LKIP

KECAMATAN PONDOKMELATI
KOTA BEKASI

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Tahun 2025		
			Target	Realisasi Keuangan	Capaian (%)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	496.972.000	470.897.712	94,75
V	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah tertib	40.000.000	31.778.500	79,45
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pondokmelati	40.000.000	31.778.500	79,45
			32.519.540.866	29.753.656.119	91,49

Sumber : Dokumen Perencanaan 2025, diolah



LKIP Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025, secara umum kinerja perangkat daerah menunjukkan pencapaian yang **baik dan efektif**, baik dari sisi realisasi keuangan maupun indikator ketercapaian program. Total pagu anggaran sebesar **Rp32.519.540.866** terealisasi sebesar **Rp29.753.656.119** atau mencapai **91,49%**, yang mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang optimal serta pengelolaan keuangan yang akuntabel.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program dengan porsi anggaran terbesar dan berperan strategis dalam mendukung kelancaran operasional perangkat daerah. Realisasi anggaran mencapai 88,08%, yang menunjukkan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran telah berjalan dengan baik.

Kinerja capaian pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 86,74% serta Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94,49% menunjukkan efektivitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Namun demikian, masih terdapat kegiatan dengan capaian yang relatif lebih rendah, seperti Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang dipengaruhi oleh efisiensi belanja dan penyesuaian kebutuhan riil selama tahun berjalan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini terealisasi sebesar 85,45% dan secara umum mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum menunjukkan capaian yang tinggi 90,62%, mencerminkan sinergi yang baik dengan perangkat daerah terkait. Namun demikian, rendahnya realisasi pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9,46% disebabkan oleh terbatasnya kewenangan pelaksanaan yang benar-benar dilimpahkan serta penyesuaian kebijakan dan kebutuhan lapangan selama tahun anggaran.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 95,84%. Tingginya capaian pada indikator Persentase LKM yang Aktif mencerminkan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam



LKIP

mendukung pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan juga terealisasi di atas 94% , menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini mencapai realisasi 94,75% , yang menggambarkan optimalnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, termasuk penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Capaian ini menunjukkan efektivitas koordinasi lintas dalam menjaga stabilitas sektor pemerintahan, ketenteraman, dan kondusivitas wilayah.

5. Koordinasi Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi anggaran program ini mencapai 79,45% . Capaian tersebut dipengaruhi oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan serta penyesuaian intensitas koordinasi ketenteraman dan Pengukuran umum berdasarkan kondisi faktual di wilayah. Meskipun realisasinya belum optimal, kegiatan yang direncanakan tetap dilaksanakan dan memberikan kontribusi terhadap terjaganya wilayah Kecamatan Pondokmelati.

Kesimpulan Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025 telah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel . Tingginya realisasi anggaran dan indikator capaian kinerja menunjukkan bahwa perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan telah selaras dengan sasaran yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan penguatan evaluasi kegiatan perencanaan agar kegiatan dengan realisasi rendah dapat lebih optimal serta tetap mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.



Bab IV
Penutup



BAB 4 PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tahun 2025, Kecamatan Pondokmelati berhasil merealisasikan seluruh target kinerja yang telah direncanakan. Capaian ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis SAKIP, serta pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dan sinergi lintas sektor juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen aparatur Kecamatan Pondokmelati dalam melaksanakan program secara transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam optimalisasi digitalisasi pelayanan, pengembangan SDM, dan pengawasan pelaksanaan proyek agar hasilnya lebih maksimal dan berkelanjutan.

Untuk tahun 2025, Kecamatan Pondokmelati akan fokus pada penguatan kapasitas aparatur, pengembangan sistem pelayanan digital yang lebih terintegrasi, serta kolaborasi dengan masyarakat dan stakeholder. Rencana tindak lanjut ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan capaian positif, sekaligus mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan wilayah.

B. Rencana Tindak

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

- **Evaluasi dan Penyempurnaan SAKIP:**
 - Melakukan audit kinerja internal secara berkala untuk memastikan keselarasan antara rencana strategis dan implementasi kegiatan.
 - Mengembangkan indikator kinerja yang lebih spesifik dan terukur sesuai dengan kebutuhan lokal.
- **Peningkatan Kompetensi Aparatur:**
 - Mengadakan pelatihan manajemen kinerja berbasis teknologi dan inovasi pelayanan publik.
 - Memberikan pelatihan kepada aparatur tentang pengelolaan data berbasis SAKIP.



2. **Digitalisasi dan Optimalisasi Pelayanan Publik**

- Mengembangkan sistem layanan berbasis aplikasi yang lebih terintegrasi, mencakup pelayanan administrasi, pengaduan masyarakat, dan informasi publik.
- Menyediakan pusat layanan digital di setiap kelurahan untuk mendukung masyarakat yang kurang akses terhadap teknologi.
- Memastikan pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur IT agar sistem pelayanan berjalan optimal.

3. **Penguatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan**

- Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan forum konsultasi publik.
- Melibatkan Pokmas/Ormas secara aktif dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan di wilayahnya.
- Menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Pokmas/Ormas dalam mengelola program secara mandiri.

4. **Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan**

- Merancang pembangunan yang mengedepankan konsep ramah lingkungan, seperti pemanfaatan teknologi hemat energi dan bahan daur ulang.
- Mengadakan pengawasan berkala pada proyek infrastruktur untuk menjamin kualitas dan kesesuaian dengan rencana.
- Memprioritaskan infrastruktur strategis yang langsung mendukung kebutuhan masyarakat, seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum.

5. **Kolaborasi dengan Stakeholder**

- Memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
- Membentuk forum lintas sektor yang fokus pada pengembangan wilayah kecamatan secara terpadu.
- Menggalang komitmen bersama untuk mendorong inovasi di bidang pelayanan dan pembangunan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kecamatan Pondokmelati berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, pelayanan, dan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.



LKIP

Bekasi, Januari 2026

Camat Pondokmelati

CECEP MIFTAH FARID, S.STP., M.M
Pembina Tingkat I,IV/B
NIP. 19760913 199701 1 001.